

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

Erlando Pratama Tiantara¹

¹Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

E-mail: erlando@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v4i1>

Diterima: 19 Desember 2020; Direvisi: 22 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

ABSTRACT

The implementation of environmental health program policies in hotels and restaurants in the Sangkanhurip and Linggarjati areas, Kuningan Regency that do not optimal is the main problem that will be discussed in this study. This can be seen from the lack of communication about environmental health programs, inadequate resources, the unresponsive attitude of policy implementers, and also the complicated bureaucratic structure at the Kuningan District Health Office. The successful implementation of environmental health program policies by the Kuningan District Health Office in hotels and restaurants in the Sangkanhurip and Linggarjati areas are influenced by some factors by Edwards III, such as communication, resources, dispositions / attitudes, and bureaucratic structures. If these factors are effective, the implementation of environmental health program policies by the Kuningan District Health Office in hotels and restaurants in the Sangkanhurip and Linggarjati areas will be successful. In this study, researchers used a qualitative descriptive method that aims to understand and find out facts in the field about the for implementing environmental health program policies for the Kuningan District Health Office in hotels and restaurants in the Sangkanhurip and Linggarjati areas and then describe it systematically. The results of this study indicate that the for implementing environmental health program policies by the Kuningan District Health Office in hotels and restaurants in the Sangkanhurip and Linggarjati areas has not been optimal, because the factors put forward by Edwards III have not been implemented effectively. This can be seen from various aspects, such as inadequate socialization to hotel and restaurant owners, very minimal facilities and budget, there are still some negative responses from the implementers, and communication failures between policy implementers, and policy implementation that are not in accordance with SOPs. This can cause the objectives of the environmental health program policy cannot be implemented optimally.

Keywords : *environmental, health program policies, policy*

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan agar terciptanya lingkungan sehat dan juga membentuk manusia yang sehat. Dalam menjaga kesehatan lingkungan, Pemerintah mempunyai payung hukum dalam menjalankan kegiatannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, terutama pada pasal 163 ayat (1) yaitu pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, keseriusan pemerintah dalam menjaga kesehatan lingkungan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Kabupaten Kuningan selaku Pemerintah Daerah, memiliki Dinas

Kesehatan sebagai organisasi yang berperan dalam menjaga kesehatan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 41 Tahun 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mempunyai tugas pokok yaitu, melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Mengacu pada tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mempunyai Program Kesehatan Lingkungan dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di Kabupaten Kuningan.

Adapun permasalahan lain dalam pelaksanaan program Kesehatan Lingkungan yaitu, birokrasi yang cenderung panjang dan rumit. Hal tersebut terjadi karena masih adanya pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang bekerja tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Kondisi tersebut akan menyebabkan aktivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan tidak fleksibel. Jika hal tersebut terjadi, maka pelayanan kepada masyarakat mengenai program Kesehatan Lingkungan menjadi lambat.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa program Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan belum optimal. Hal tersebut dapat didukung oleh beberapa data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, yang mencatat bahwa :

1. Terdapat 13 rumah makan yang belum mempunyai keterangan laik sehat, dari 39 rumah makan atau restoran yang ada di kabupaten kuningan
2. Terdapat 12 hotel atau wisma yang belum mempunyai keterangan layak sehat, dari 30 hotel atau wisma yang ada di kabupaten kuningan
3. Beberapa depot air minum tidak memiliki sertifikat layak hygiene

sanitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

4. Masih adanya pemukiman yang kumuh di beberapa daerah di Kabupaten Kuningan
5. Belum terdaptarnya makanan jajanan yang diperjual belikan di ditempat umum kepada masyarakat.

Jika hal tersebut terus terjadi, maka akan timbul pendapat masyarakat bahwa tempat-tempat umum seperti hotel, kolam renang, kemudian makanan jajanan tersebut tidak sehat, karena belum dilengkapi dengan surat atau keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan terutama Seksi Kesehatan Lingkungan, yang mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Dalam melaksanakan program Kesehatan Lingkungan, tentunya Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Terjalinnnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan masyarakat dalam pelaksanaan program Kesehatan Lingkungan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai sejauh mana keseriusan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kesehatan lingkungan terfokus kesehatan lingkungan di Hotel dan Restoran yang ada di Wilayah Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kuningan karena Kabupaten Kuningan merupakan daerah konservasi yang dituntut untuk bisa menjaga kesehatan lingkungannya, serta dalam mendukung program pemerintah kabupaten kuningan untuk menjadi kabupaten wisata, Adapun judul penelitian ini yaitu "Implementasi Kebijakan Program Kesehatan Lingkungan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan" (Studi Kasus Kesehatan Lingkungan di Hotel dan Restoran yang ada di Wilayah

Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan).

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis secara kualitatif sebagai metode analisis dan data disajikan secara deskripsi. Maksud dari penyajian secara deskripsi adalah suatu cara mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat dengan menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan program Kesehatan Lingkungan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Kesehatan Lingkungan di Hotel dan Restoran yang ada di wilayah Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan).

Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif selama terjun di lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa model antara lain model menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008:246) menjelaskan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*”.

Model analisis data dapat dijelaskan dengan :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sugiyono (2008:247) mengemukakan bahwa :

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Mengacu pada pendapat tersebut, maka reduksi data adalah pengumpulan data penting dan sesuai dengan penelitian untuk selanjutnya diolah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sugiyono (2008:249) menjelaskan “setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya”.

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa cerita sistematis. Dengan adanya sajian ada memungkinkan peneliti dapat mengambil kesimpulan. Data-data yang telah diperoleh di lapangan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi yang peneliti lakukan, kemudian data disajikan melalui sebuah deskripsi hasil penelitian.

Tabel 1. Parameter Implementasi Kebijakan

Aspek Kajian	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan Program Kesehatan Lingkungan (Edwards III dalam Subarsono (2010:90-92))	Komunikasi	1. Sosialisasi Program Kesehatan Lingkungan 2. Forum Group Discussion dengan Stake Holder
	Sumber Daya	1. Pelaksana Program 2. Masyarakat
	Disposisi	1. Singkronisasi antara Internal Pemerintahan 2. Singkronisasi antara Pemerintah dan Masyarakat
	Struktur Birokrasi	1. Standar operasional Prosedur (SOP)

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Sugiyono (2008:253) mengemukakan bahwa : sKesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan reduksi data dan penyajian data. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan dari data-data yang diperoleh pada saat sajian data, pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang berkaitan dengan penelitian.

Implementasi Kebijakan Program Kesehatan Lingkungan di Hotel dan Restoran Wilayah Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan

Kesehatan lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kesehatan lingkungan yang baik, harus dilakukan upaya penyehatan lingkungan, misalnya menghindari pencemaran air dengan tidak membuang sampah sembarangan, penyediaan makanan dan minuman yang higienis dan kegiatan lainnya dalam penyehatan lingkungan. Dari adanya kegiatan dalam penyehatan lingkungan tersebut diharapkan kualitas kesehatan lingkungan dapat meningkat sehingga kualitas hidup masyarakat pun meningkat. Dasar hukum program kesehatan lingkungan antara lain yaitu Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memiliki Dinas Kesehatan sebagai organisasi yang berperan menjaga kesehatan lingkungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan membuat kebijakan dengan dibuatnya Program Kesehatan Lingkungan. Bagian yang melaksanakan Program Kesehatan Lingkungan tersebut adalah Seksi Kesehatan Lingkungan. Program Kesehatan Lingkungan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan meliputi: peningkatan kesehatan lingkungan pemukiman, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan air, dan juga pengamanan limbah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 bahwa ruang kesehatan lingkungan yaitu: penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat/sampah, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan vektor penyakit, serta penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana.

Terdapat beberapa permasalahan kesehatan lingkungan di Kabupaten Kuningan diantaranya masih adanya fasilitas umum yang belum mempunyai surat keterangan layak sehat, restoran makanan yang belum dilengkapi surat keterangan layak sehat maupun tempat pengelolaan sampah yang tidak sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dapat diketahui bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan kesehatan lingkungan di Kabupaten Kuningan sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

“Kesehatan lingkungan merupakan komponen yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Kuningan. Namun banyak permasalahan kesehatan lingkungan di Kabupaten Kuningan yang belum bisa diselesaikan, misalnya saja kesehatan pemukiman, kesehatan

makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, dan juga kesehatan fasilitas umum. Permasalahan tersebut harus segera dicari solusinya agar kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kuningan menjadi lebih baik”. (Tanggal 24 februari 2020)

1. Komunikasi

Proses komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan yang efektif akan terlaksana apabila para pejabat atau aparat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan baru dapat berjalan apabila komunikasi berlangsung baik. Oleh karena itu, peraturan yang telah dibuat harus dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten oleh para pembuat kebijakan kepada pelaksana sehingga para pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan.

Kebijakan kesehatan lingkungan dibuat oleh pemerintah dalam hal ini oleh pemerintah pusat dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang dibuat oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat wajib mensosialisasikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya komunikasi tidak berhenti sampai pemerintah daerah saja akan tetapi pemerintah daerah melalui SKPD dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten harus mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui adanya kebijakan kesehatan tentang kesehatan lingkungan.

Komunikasi efektif bisa tercapai apabila pesan yang disampaikan komunikator bukan hanya bisa diterima komunikan dengan jelas, melainkan juga mempengaruhi dan dilaksanakan oleh komunikan. Pesan yang ingin disampaikan terkait diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014

tentang Kesehatan adalah memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk segera menciptakan lingkungan yang sehat di daerahnya masing-masing.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Jika dalam suatu pelaksanaan suatu kebijakan tidak mempunyai sumber daya yang baik maka sudah dapat dipastikan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya berperan penting dalam implementasi sesuatu program/kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Staf. Dalam konteks ini setiap staf/pegawai harus mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut sangatlah penting mengingat para pegawai mempunyai tugas agar suatu program dapat terlaksana dengan baik.
2. Fasilitas, merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti gedung, operasional, komputer dan seluruh barang atau benda yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Dana. Diperlukan untuk membiayai dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sangatlah bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Adapun penjelasan peneliti mengenai pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan.

3. Dana

Sumber daya finansial atau dana sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Edwards III (1980:53) menjelaskan bahwa: “Sumber daya keuangan

(finansial) merupakan faktor penting dalam menunjang implementasi kebijakan”. Program kesehatan lingkungan merupakan kebijakan publik yang didanai dari keuangan pemerintah. Semakin tinggi dukungan dana dari pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, kesiapan dana sangat diperlukan dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan. Dana secara umum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya dana atau anggaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka sudah pasti kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Adapun beberapa sumber keuangan pembiayaan kesehatan di Kabupaten Kuningan yang berbeda yaitu APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Pembiayaan kesehatan tahun 2018 di Kabupaten Kuningan (Dinas Kesehatan, RSUD 45 dan RSUD Linggajati) sebesar Rp. 339,160,863,945,- (11,83% dari total APBD Kabupaten). Peneliti mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mengenai anggaran kesehatan bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 298,083,888,345,- (87,89%); anggaran kesehatan dari APBD Propinsi sebesar Rp. 5,812,705,600,- (1,71%); anggaran kesehatan bersumber dana APBN sebesar Rp. 35,264,270,000,- (10,40%). Adapun pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mengenai minimnya anggaran untuk program kesehatan lingkungan bahwa: “Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dalam implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan adalah minimnya dana yang dialokasikan pada program kesehatan lingkungan. Hal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya hasil dari implentasi program kesehatan lingkungan”. Selanjutnya keterangan dari Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan sebagai berikut:

“Kami mengalami kesulitan dalam menjalankan program kesehatan

lingkungan, hal tersebut dikarenakan sangat minimnya anggaran yang kami miliki. Contohnya dalam hal pengambilan sampel air bagi pemeriksaan depot air minum, kami tidak mempunyai dana untuk membiayai operasioanal kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami Dinas Kesehatan melakukan penarikan retribusi kepada pengusaha agar proses pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum bisa dilaksanakan”. (Tanggal 24 februari 2020)

4. Disposisi

Disposisi atau sikap adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan secara benar, professional sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Sikap atau disposisi sangatlah penting dalam pencapaian tujuan dari suatu program karena, suatu kebijakan tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika para pelaksananya tidak mempunyai sikap atau disposisi yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan tugas.

Peneliti berpendapat bahwa sikap merupakan sesuatu yang dilakukan akibat adanya interaksi yang dialami seseorang dengan lingkungan. Adapun pendapat Edwards III (1980:30) mengenai disposisi adalah sebagai berikut:

“Sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya”.

Dari penjelasan Edward tersebut, maka bisa diketahui bahwa pelaksana kebijakan akan memiliki respon positif dan negatif terhadap suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya peran sikap pelaksana dalam implentasi suatu

program/kebijakan dijelaskan juga oleh Hessel (2003:90) yaitu sebagai berikut:

“Jika para implementator memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementator untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementator ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplemtasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit”.

Berdasarkan pendapat Hessel di atas kita dapat mengetahui bahwa meskipun para pelaksana kebijakan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun ketika para imlementator tidak setuju atau mempunyai respon negatif terhadap kebijakan tersebut, maka pelaksana tidak akan melaksanakan kebijakan dengan benar.

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan di hotel dan restoran yang berada di Wilayah Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan maka dapat ditarik simpulan berikut:

1. Implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan di Hotel dan Restoran yang ada di Wilayah Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan didasarkan atas empat dimensi atau pengukur (Edwards III) dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut:
 - a. Komunikasi kebijakan program kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan kepada hotel dan restoran yang berada di Wilayah Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan belum Optimal, dimana ada sebagian pihak hotel dan restoran yang merasa masih kurang

jelasan sosialisasi program kesehatan lingkungan, mengingat isi dari kebijakan program kesehatan lingkungan yang cukup kompleks. Hal ini meyebabkan pihak hotel dan restoran merasa bingung untuk ikut menjalankan program yang dibuat oleh pemerintah.

- b. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dilihat dari jumlah sudah mencukupi kebutuhan namun jika dilihat dari segi pengetahuan tenaga kesehatan lingkungan dirasa masih kurang dikarenakan belum pahamnya permasalahan kesehatan lingkungan di lingkup masyarakat Kabupaten Kuningan. Dilihat dari fasilitas kesehatan yang ada terutama jumlah puskesmas sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, namun masih kekurangan fasilitas dalam menjalankan kegiatan operasional seperti komputer, printer dan juga kendaraan operasional. Selanjutnya dilihat dari ketersediaan anggaran untuk kebijakan program kesehatan lingkungan sangatlah minim. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan program kesehatan lingkungan berjalan tidak maksimal.
- c. Disposisi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan menunjukkan masih ditemukan respon positif terhadap kebijakan pemerintah pusat tentang kesehatan lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan program kesehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Namun masih ditemukannya sikap negatif dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan program kesehatan lingkungan yang dapat diketahui dengan masih adanya pegawai yang tidak responsif dalam

- melaksanakan kebijakan program kesehatan lingkungan tersebut.
- d. Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan masih ditemukan fragmentasi yaitu gagalnya komunikasi antar pelaksana kebijakan. Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan masih ada yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut bisa menyebabkan implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan menjadi tidak optimal.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan di Hotel dan Restoran yang ada di Wilayah Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Komunikasi kebijakan program kesehatan lingkungan oleh Pemerintah Pusat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sudah berjalan, tetapi masih belum optimal sebagaimana respon positif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang membuat kebijakan Program Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Kuningan.
 - 2) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dilihat dari jumlahnya sudah mencukupi kebutuhan. Hal tersebut dapat diketahui dari penempatan tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan juga penempatan masing-masing satu tenaga kesehatan lingkungan di setiap puskesmas.
 - 3) Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kuningan terutama jumlah puskesmas yang ada sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bahkan pada tahun 2018 jumlah puskesmas di Kabupaten Kuningan melebihi standar nasional dengan rasio puskesmas terhadap penduduk yaitu 1 : 31.153 penduduk sedangkan rasio nasional yaitu 1 : 30.000 penduduk.
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Masih kurang jelasnya sosialisasi program kesehatan lingkungan kepada para pengusaha dan juga masyarakat umum, mengingat isi dari kebijakan program kesehatan lingkungan yang cukup kompleks.
 - 2) Terdapat sumber daya manusia atau pegawai pelaksana kebijakan program kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang belum memahami permasalahan kesehatan lingkungan di lingkup masyarakat Kabupaten Kuningan.
 - 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan masih kekurangan fasilitas dalam menjalankan kegiatan operasional termasuk program kesehatan lingkungan seperti komputer, printer dan juga kendaraan operasional.
 - 4) Ketersediaan anggaran untuk kebijakan program kesehatan lingkungan sangatlah minim, dimana pada tahun 2018 anggaran yang didapatkan Seksi Kesehatan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 100.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk 2 kegiatan yaitu Rp. 50.000.000 untuk jambanisasi dan Rp. 50.000.000 untuk sertifikasi rumah tangga.
 - 5) Masih ditemukannya sikap negatif atau kurang responsif dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan program kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

- 6) Masih ditemukan fragmentasi yaitu gagalnya komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam struktur birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan serta pelaksanaan kebijakan masih ada yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan implementasi kebijakan program kesehatan lingkungan di Hotel dan Restoran yang ada di Wilayah Sangkanhurip dan Linggarjati Kabupaten Kuningan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi kinerja para pelaksana kebijakan program kesehatan lingkungan di Kabupaten Kuningan pada setiap tahunnya.
 - b. Melakukan pembinaan kepada para pelaksana kebijakan program kesehatan lingkungan agar dapat memahami dengan baik permasalahan kesehatan lingkungan di Kabupaten Kuningan dan mampu memberikan respon positif dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan.
 - c. Pengadaan fasilitas yang kurang dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan lingkungan secara bertahap pada setiap tahunnya, seperti komputer, printer dan juga kendaraan operasional.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan pada uraian tersebut maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan harus mengadakan rapat internal guna meningkatkan komunikasi menjadi lebih baik. Saat rapat internal pimpinan dengan para pelaksana bisa membahas implementasi kebijakan program

- kesehatan lingkungan, dimana pada forum rapat tersebut para pelaksana diharapkan memahami apa maksud dan tujuan dari adanya kebijakan tersebut, dan mampu untuk mengimplementasikannya. Setelah para pelaksana paham mengenai program kebijakan kesehatan lingkungan, maka hal selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha dan juga masyarakat mengenai program kesehatan lingkungan. Sosialisasi program kepada para pengusaha produksi barang, makanan, minuman dan juga jasa bisa dengan cara datang langsung ke tempat pengusaha tersebut, atau dengan cara mengundang langsung ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan harus mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para pelaksana kebijakan program kesehatan lingkungan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Selesai diklat tersebut diharapkan kemampuan para pelaksana kebijakan program kesehatan lingkungan menjadi lebih baik. Selain itu, diperlukan perhatian pemerintah daerah mengenai fasilitas dan juga alokasi anggaran untuk program kesehatan lingkungan mengingat anggaran bagi program tersebut sangat minim.
3. Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan harus memberikan arahan kepada para pelaksana kebijakan program kesehatan lingkungan dikarenakan masih adanya respon negatif yang ditunjukkan oleh para pelaksana. Melalui hal tersebut diharapkan pelaksanaan kebijakan program kesehatan lingkungan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Gagalnya komunikasi atau fragmentasi dan pelaksanaan program yang tidak sesuai SOP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dapat diselesaikan dalam rapat internal yang diikuti oleh

para pelaksana. Pada rapat tersebut para pelaksana dapat saling memberi saran agar implementasi kebijakan dapat tercapai dan pimpinan dapat pula memberi arahan dan teguran langsung kepada para pelaksana kebijakan yang tidak bekerja secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah A. Chaedar. 2009. *Pokoknya Kualitatif*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York: Basil Blackwell Ltd.
- Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : EGC.
- Edward, George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterfly Press.
- Hessel, Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta : Lukman Ofset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Padang: Mandar Maju.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Analisis Data Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UMM Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Serta Kopetensi Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.